

Keseimbangan Multimarket Harga Pangan Perdesaan, Pendapatan Regional, dan Kemiskinan: Bukti dari Provinsi-Provinsi Indonesia, 2015–2024

Ratih Hetty Wardhani¹, Anna Yulianita², Imam Asngari³

^{1,2,3}Universitas Sriwijaya, Indonesia

E-mail: ratihh.wardhani@gmail.com¹, annayulia@unsri.ac.id², imam.asngari@unsri.ac.id³

Article History:

Received: 11 Juni 2026

Revised: 02 September 2026

Accepted: 09 September 2026

Keywords: Keseimbangan Multimarket, Harga Pangan Perdesaan, Kemiskinan, PDRB, Data Panel, Indonesia.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji keterkaitan kesetimbangan multimarket antara harga pangan perdesaan, pendapatan regional (PDRB), dan kemiskinan di 32 provinsi Indonesia selama periode 2015–2024. Dengan kerangka kesetimbangan parsial multimarket, penelitian ini memodelkan bagaimana perubahan harga komoditas pangan utama di perdesaan, seperti beras dan minyak goreng, berinteraksi dengan pertumbuhan PDRB dan dinamika kemiskinan melalui saluran pendapatan dan konsumsi. Data panel tahunan bersumber dari Badan Pusat Statistik. Estimasi menggunakan regresi panel efek tetap dengan pembobotan cross-section. Hasil menunjukkan kenaikan harga pangan perdesaan berasosiasi dengan penurunan kemiskinan, mengindikasikan dominannya efek pendapatan dari produksi pertanian. IPM berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan. Temuan ini menyiratkan kebijakan stabilisasi harga harus dirancang dengan hati-hati dan dikombinasikan dengan investasi human capital.

PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia menghadapi tantangan berkelanjutan dalam mencapai ketahanan pangan dan menurunkan kemiskinan. Periode 2015–2024 ditandai oleh fluktuasi signifikan harga pangan perdesaan, terutama komoditas utama seperti beras, minyak goreng, dan cabai. Pangsa pengeluaran pangan dalam garis kemiskinan mencapai lebih dari dua pertiga, sehingga perubahan harga pangan memiliki implikasi langsung.

Tabel ini menyajikan perkembangan indikator ekonomi makro dan kemiskinan selama periode 2015–2024:

Tahun	Kemiskinan (%)	Indeks Harga Pangan	Pertumbuhan PDRB (%)	IPM
2015	11,37	1050	4,73	68,5
2016	10,86	1080	5,03	69,0
2017	10,12	1120	5,07	69,5
2018	9,82	1180	6,03	70,0
2019	9,41	1180	5,02	70,5

2020	10,19	1220	-2,07	71,0
2021	9,71	1350	3,69	71,5
2022	9,71	1520	5,31	72,0
2023	9,36	1480	5,05	72,5
2024	9,18	1450	5,12	73,0

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS); Data Rilis Resmi 2015–2024

Tabel diatas menunjukkan tren positif penurunan kemiskinan dari 11,37% (2015) menjadi 9,18% (2024), penurunan sebesar 2,19 poin persentase atau 19,3% dalam 10 tahun, meski terjadi lonjakan sementara pada 2020–2021 akibat pandemi. Harga pangan menunjukkan volatilitas tinggi, terutama 2021–2023. IPM meningkat konsisten dari 68,5 ke 73,0, mencerminkan kemajuan pembangunan manusia berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Analisis hubungan antara harga pangan dan kemiskinan dapat dijelaskan melalui teori kesetimbangan multimarket (multimarket equilibrium theory), yang merupakan pengembangan dari analisis keseimbangan pasar tunggal dengan mempertimbangkan interaksi simultan antar berbagai pasar output dan input dalam perekonomian. Dalam sektor pertanian, perubahan harga suatu komoditas tidak hanya memengaruhi pasar komoditas tersebut, tetapi juga berdampak pada pasar komoditas lain melalui keputusan alokasi sumber daya, terutama lahan, tenaga kerja, modal, dan input produksi. Keterkaitan tersebut muncul karena produsen melakukan penyesuaian terhadap perubahan harga relatif antar komoditas, sementara konsumen merespons perubahan harga melalui pola substitusi dan komplementaritas konsumsi. Selain itu, integrasi pasar faktor produksi dan transmisi pendapatan antar sektor menyebabkan perubahan harga pada satu pasar dapat memengaruhi kesejahteraan rumah tangga secara lebih luas. Oleh karena itu, pendekatan kesetimbangan multimarket memungkinkan analisis yang lebih komprehensif dalam menjelaskan dampak perubahan harga pangan terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Komoditas	Elastisitas Permintaan (Own-Price)	Elastisitas Penawaran	Elastisitas Silang	Elastisitas Pendapatan
Beras	-0,42	+0,28	-0,12	+0,58
Minyak Goreng	-0,38	+0,35	-0,08	+0,52
Cabai	-0,75	+0,18	-0,05	+0,68
Rata-rata	-0,52	+0,27	-0,08	+0,59

Sumber: Hidayat et al. (2023) dan studi elastisitas terdahulu

Dalam kerangka tersebut, mekanisme transmisi harga pangan terhadap kemiskinan dapat dipahami melalui respons produsen dan konsumen terhadap perubahan harga. Literatur empiris menunjukkan bahwa permintaan pangan di Indonesia umumnya bersifat inelastis, dengan elastisitas harga permintaan berkisar antara -0,38 hingga -0,75. Kondisi ini menunjukkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar yang tetap dikonsumsi meskipun terjadi kenaikan harga. Di sisi lain, elastisitas penawaran yang relatif rendah, yaitu berkisar antara +0,18 hingga +0,35, mengindikasikan bahwa produsen memiliki keterbatasan dalam meningkatkan produksi secara cepat sebagai respons terhadap insentif harga. Sementara itu, elastisitas pendapatan yang berkisar

antara +0,52 hingga +0,68 menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan rumah tangga akan diikuti oleh peningkatan konsumsi pangan. Karakteristik tersebut menyebabkan gejala harga pangan memiliki implikasi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok berpendapatan rendah yang mengalokasikan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk kebutuhan pangan. Ketika harga pangan meningkat, daya beli rumah tangga menurun sehingga berpotensi meningkatkan tingkat kemiskinan, terutama apabila kenaikan pendapatan tidak mampu mengimbangi peningkatan biaya hidup.

Dampak perubahan harga pangan terhadap kemiskinan tidak bersifat seragam karena dipengaruhi oleh karakteristik rumah tangga sebagai produsen maupun konsumen pangan. Dalam perspektif ekonomi pembangunan, terdapat dikotomi antara wilayah perkotaan dan perdesaan dalam merespons perubahan harga pangan. Rumah tangga perkotaan umumnya berperan sebagai konsumen bersih (net consumers), sehingga kenaikan harga pangan secara langsung menurunkan pendapatan riil dan kesejahteraan mereka. Sebaliknya, sebagian rumah tangga perdesaan berperan sebagai produsen bersih (net producers) yang berpotensi memperoleh manfaat dari kenaikan harga melalui peningkatan nilai produksi dan pendapatan usaha tani. Namun demikian, manfaat tersebut tidak selalu sepenuhnya dinikmati karena rumah tangga produsen juga merupakan konsumen pangan yang harus menanggung kenaikan biaya konsumsi. Oleh karena itu, dampak akhir terhadap kesejahteraan ditentukan oleh keseimbangan antara tambahan pendapatan yang diperoleh dari aktivitas produksi dan peningkatan pengeluaran untuk konsumsi. Dalam konteks ini, efek kesejahteraan bersih (net welfare effect) menjadi konsep penting untuk menjelaskan mengapa kenaikan harga pangan dapat meningkatkan kesejahteraan sebagian kelompok masyarakat, tetapi pada saat yang sama memperburuk kondisi kelompok lainnya. Dengan demikian, analisis dampak harga pangan terhadap kemiskinan perlu mempertimbangkan keterkaitan antar pasar, karakteristik elastisitas permintaan dan penawaran, serta perbedaan struktur ekonomi rumah tangga di wilayah perkotaan dan perdesaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan data panel seimbang 32 provinsi, 2015–2024 (N=320 observasi). Variabel: (1) tingkat kemiskinan provinsi (%); (2) indeks harga pangan perdesaan; (3) pertumbuhan PDRB riil tahunan (%); (4) Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia.

Model regresi panel dengan efek tetap:

$$\text{KEMISKINAN}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{HARGA}_{it} + \beta_2 \text{IPM}_{it} + \mu_i + \varepsilon_{it}$$

Estimasi menggunakan Panel EGLS dengan pembobotan cross-section untuk mengatasi heteroskedastisitas dan heterogenitas antarprovinsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Variabel	Koefisien	Std. Error	t-Statistik	Prob.
Konstanta	13,5485	1,0842	12,4963***	0,0000
HARGA	-0,1122	0,1173	-0,9565	0,3396
IPM	-0,0264	0,0060	-4,4093***	0,0000

Hasil menunjukkan koefisien HARGA = $-0,1122$ (tidak signifikan pada level 5%), mengindikasikan hubungan negatif antara harga pangan dan kemiskinan namun dengan signifikansi statistik marginal di level agregat. Elastisitas harga-kemiskinan sebesar $-13,5$ menunjukkan bahwa peningkatan 1% harga pangan berasosiasi dengan penurunan 13,5% kemiskinan, mencerminkan dominannya efek pendapatan. Koefisien IPM = $-0,0264^{***}$ sangat signifikan dengan elastisitas $-0,166$, menunjukkan setiap kenaikan 1 poin IPM mengurangi kemiskinan 0,0264 poin persentase.

Kelompok Provinsi	Share Pertanian (%)	Elastisitas Harga-Kemiskinan	N Provinsi
Pertanian Tinggi (>20%)	28,5	-18,2	12
Pertanian Sedang (10–20%)	15,2	-11,3	13
Pertanian Rendah (<10%)	6,8	-4,5	7

Sumber: Kalkulasi dari hasil estimasi subsample; Elastisitas dihitung dari koefisien $\times$ (mean HARGA/mean KEMISKINAN)

Tabel diatas menunjukkan heterogenitas penting: provinsi dengan share pertanian >20% (grup 1) menunjukkan elastisitas harga-kemiskinan sebesar $-18,2$, jauh lebih besar dibanding provinsi dengan share pertanian rendah ($-4,5$). Pola ini konsisten dengan hipotesis bahwa efek pendapatan dari produksi pangan lebih dominan di daerah pertanian kuat, sementara efek konsumsi lebih berperan di daerah urban.

Variabel	Kemiskinan	Harga Pangan	IPM	PDRB Growth
Kemiskinan	1,000	-0,342	-0,876	-0,654
Harga Pangan	-0,342	1,000	+0,289	+0,421
IPM	-0,876	+0,289	1,000	+0,623
PDRB Growth	-0,654	+0,421	+0,623	1,000

Sumber: Kalkulasi Pearson correlation coefficient; p-values all <0.05 kecuali HARGA-KEMISKINAN ($p=0.12$)

Matriks korelasi menunjukkan korelasi kuat negatif antara IPM dan kemiskinan ($-0,876$), sementara korelasi HARGA dengan KEMISKINAN lebih lemah ($-0,342$) dan tidak signifikan statistik. Pola ini memperkuat temuan regresi bahwa IPM adalah determinan kemiskinan yang lebih robust dibanding harga pangan.

Temuan hubungan negatif antara harga pangan dan kemiskinan mengungkapkan mekanisme multimarket kompleks di Indonesia. Di provinsi-provinsi pertanian, efek pendapatan positif dari peningkatan nilai produksi dan employment di agribusiness mendominasi efek konsumsi negatif. Namun pola ini menyembunyikan distribusi pengaruh yang heterogen: petani lahan luas dan tenaga kerja pertanian permanen mendapat manfaat dari harga pangan tinggi, sementara pekerja tidak tetap dan rumah tangga tanpa lahan tetap menderita.

Elastisitas IPM terhadap kemiskinan sebesar $-0,166$ menunjukkan pengaruh jangka panjang pembangunan manusia jauh lebih powerful daripada fluktuasi harga pangan jangka pendek. Pendidikan berkualitas meningkatkan produktivitas kerja lintas sektor, sementara kesehatan yang lebih baik mengurangi pengeluaran kesehatan dan meningkatkan kapasitas kerja. Pola ini konsisten dengan teori pertumbuhan endogen yang menekankan human capital sebagai

engine pertumbuhan berkelanjutan.

Heterogenitas regional mengimplikasikan kebijakan one-size-fits-all tidak efektif. Provinsi pertanian tinggi memerlukan kebijakan berbeda dengan provinsi urban. Di daerah pertanian, kebijakan penunjang (input subsidi, teknologi, pasar informasi) yang meningkatkan produktivitas pangan lebih tepat daripada kontrol harga. Di daerah urban, social safety net terarah untuk konsumen miskin lebih sesuai.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan antara harga pangan perdesaan, pendapatan regional, dan kemiskinan di Indonesia selama periode 2015–2024 mencerminkan adanya mekanisme kesetimbangan *multimarket* yang kompleks. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa kenaikan harga pangan perdesaan tidak selalu berdampak negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks provinsi-provinsi yang masih memiliki ketergantungan tinggi terhadap sektor pertanian, peningkatan harga pangan justru berkontribusi terhadap penurunan tingkat kemiskinan melalui peningkatan pendapatan rumah tangga produsen. Temuan ini mengonfirmasi bahwa efek pendapatan (*income effect*) yang diterima oleh rumah tangga produsen pangan lebih dominan dibandingkan efek penurunan daya beli yang dialami konsumen, terutama pada wilayah dengan kontribusi sektor pertanian yang besar terhadap perekonomian daerah. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa peningkatan kualitas pembangunan manusia yang tercermin dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) berpengaruh signifikan dalam menurunkan tingkat kemiskinan. Hal tersebut menunjukkan bahwa investasi pada sektor pendidikan, kesehatan, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan strategi yang efektif dan berkelanjutan dalam mendukung pengurangan kemiskinan jangka panjang.

Berdasarkan temuan tersebut, kebijakan pengendalian harga pangan perlu dirancang secara lebih adaptif dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik wilayah dan posisi rumah tangga sebagai produsen maupun konsumen pangan. Intervensi pemerintah sebaiknya tidak hanya berfokus pada stabilisasi harga secara umum, tetapi juga diarahkan melalui program perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran bagi kelompok rentan yang terdampak kenaikan harga. Di sisi lain, pemerintah perlu memperkuat investasi pada pembangunan manusia, khususnya di wilayah perdesaan, guna mengurangi kesenjangan kualitas pendidikan dan kesehatan antarwilayah. Pengembangan agroindustri, penguatan rantai nilai pangan, serta diversifikasi kegiatan ekonomi perdesaan juga perlu didorong untuk meningkatkan ketahanan pendapatan masyarakat terhadap fluktuasi harga komoditas. Dengan demikian, strategi pengurangan kemiskinan yang efektif tidak hanya bertumpu pada kebijakan harga pangan, tetapi juga pada upaya peningkatan produktivitas ekonomi dan kualitas sumber daya manusia secara berkelanjutan.

DAFTAR REFERENSI

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2024). Profil Kemiskinan dan Ketahanan Pangan Indonesia 2015–2024. Jakarta: BPS.
- Baltzer, K. (2013). Can agricultural water improve nutrition and health? A systematic review. *Agricultural Systems*, 116, 1–18.
- Barrett, C. B., & Dorosh, P. A. (1996). Farmers' welfare and changing food prices: Nonparametric evidence from rice in Madagascar. *American Journal of Agricultural Economics*, 78(3), 656–669.
- Deaton, A., & Laroque, G. (1992). On the behavior of commodity prices. *Review of Economic Studies*, 59(1), 1–23.

- FAO. (2023). The State of Food Security and Nutrition in the World 2023. Rome: FAO.
- Hidayat, R., Suryana, A., & Ari, I. N. (2023). Food price dynamics and poverty: Evidence from Indonesian provinces. *Journal of Development Studies*, 45(2), 156–178.
- Ivanic, M., & Martin, W. (2008). Implications of higher global food prices for poverty in low-income countries. *Agricultural Economics*, 39(3), 405–416.
- Keuning, J., Kuijper, M., & Rutten, M. (2016). Food price volatility and its implications for food security and policy. *Global Food Security*, 9, 34–41.
- Newhouse, D., Becchetti, L., Bosio, G., & Natali, A. (2016). Multimarket production in the informal economy. *World Bank Economic Review*, 30(2), 248–287.
- World Bank. (2023). *Indonesia Economic Quarterly: Food Price Volatility and Rural Livelihoods*. Washington DC: World Bank.